



Tentang Analisis Sosial

Seri 2 rangkaian modul CREAME (Critical Research Methodology)

Dokumen ini menggunakan lisensi
Creative Commons:
Attribution, Non-commercial, Share Alike
(by - nc - sa).

Silakan menggandakan dan mengedarkan pada pihak lain asalkan disertai dengan atribusi kepada CIPG sebagai pembuat dokumen (cc: by).

Silakan meningkatkan kualitas isi (to enhance) dengan syarat bahwa dokumen tersebut dibuat di dalam lisensi creative commons yang sama seperti tertera di atas (cc: sa).

Anda **DILARANG** menggunakan, menggandakan, mengubah isi, maupun mengedarkan dokumen ini bila terkait kegiatan **KOMERSIAL** (cc: nc).



Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
A. Panduan <i>Live-In</i>	1
Pendahuluan: Mengapa <i>Live-In</i> ?	2
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	3
Lokasi	3
Waktu dan Dinamika Pelaksanaan	3
Langkah-langkah Melakukan <i>Live-In</i>	4
"Isi" Dialog	5
B. Memahami Beberapa Isu Sosial Kontemporer	9
Pendahuluan	10
Memahami Konteks: Globalisasi (dan Pengaruhnya)	11
Pembagian Rezeki dan Kekuasaan	14
Isu-isu Kontemporer dalam Masyarakat Kita	17
Penutup	22
Bacaan Lanjut	23
C. Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia	27
Pendahuluan	28
Sistem Ekonomi	29
Sistem Ekonomi Kapitalis	29
Sistem Ekonomi Sosialis	30
Sistem Politik	32
Sistem Politik Totalitarian	32

Sistem Politik Demokrasi	32
Perpaduan Sistem Politik Ekonomi	33
Sistem Ekonomi-Politik Indonesia	36
Kesimpulan dan Penutup	37
Referensi	39

Daftar Tabel

Tabel 1 Perbedaan antara Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis	31
Tabel 2 Perbedaan antara Sistem Politik Totalitarian dan Sistem Politik Demokrasi	33
Tabel 3 Politik Ekonomi Indonesia Antar Masa	37

A. Panduan *Live-In*

Disusun oleh Leonardus Kristianto Nugraha dan Yanuar Nugroho

A. Panduan *Live-In*

Disusun oleh Leonardus Kristianto Nugraha dan Yanuar Nugroho

Pendahuluan: Mengapa *Live-in*?

“Pengalaman adalah guru terbaik”, begitu pepatah bijak mengatakan. Dalam hal ini, proses ‘mengalami’ dalam aneka kegiatan merupakan tahapan yang penting untuk memberi kesempatan bagi seseorang untuk merasakan suatu hal secara intens. Dalam daur belajar pengalaman berstruktur, ‘mengalami’ menjadi langkah pertama sebelum peserta mengungkapkan pengalaman tersebut, mengolah dan menganalisis data berdasarkan pengalaman tersebut, menyimpulkan dan menerapkan, sebelum kembali ‘mengalami’.

Dalam konteks analisis sosial, ‘mengalami’ pun mendapat tempat yang istimewa. Latar belakangnya adalah karena dinamika sosial hanya dapat dipahami secara tepat ketika seseorang berani masuk dan mengalami sendiri dinamika itu. Pendekatan analisis sosial (Ansos) akan menjadi kurang tajam apabila seseorang tidak pernah mengalami pengalaman tinggal (terlebih bersama kelompok-kelompok terpinggirkan) dalam masyarakat. Dengan lain perkataan, pemahaman menyeluruh mengenai dinamika sosial hanya dapat dilakukan ketika seseorang berani masuk dan dekat dengan dinamika sosial tersebut, dan tidak hanya meneropong dinamika itu dari kejauhan, melalui ‘menara’ teori keilmuan yang terkadang mengasumsikan dan menggeneralisir banyak hal.

Oleh karena itu, *live-in* menjadi salah satu sarana yang ampuh untuk melepaskan diri dari asumsi-asumsi yang mengekang. *Live-in*, dengan demikian akan menjadi pengalaman yang ‘membebaskan’ seorang pelaku Ansos dari kebiasaan dan kecenderungan untuk membuat putusan tanpa terlebih dahulu melihat fakta yang terpapar di lapangan. Dalam *live-in*, pengalaman (‘mengalami’) dan inter-

aksi bersama ‘yang lain’ (*the Other*) adalah hal dan aktivitas utama yang akan dilakukan. *Live-in*, dalam konteks analisis sosial, merupakan gerbang dan pangkal refleksi untuk kegiatan dan pengolahan selanjutnya.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi

Kami sadar bahwa model analisis tidak pernah bebas nilai. Dan kami secara sadar pula memilih untuk mengambil posisi keberpihakan kepada mereka yang dalam praktik sosial sehari-hari kalah atau dikalahkan dalam berbagai struktur dan sistem sosial. Atas latar belakang itu, maka *live-in* untuk mengamati dinamika sosial juga ditempatkan dalam tempat/komunitas para saudara yang terkalahkan dalam struktur dan sistem sosial. Beberapa tempat/komunitas yang dapat dipakai, misalnya komunitas para nelayan, petani, buruh, anak jalanan, kaum miskin kota, mahasiswa, maupun aneka kelompok lain yang terpaksa harus minggir dalam laju roda pembangunan demi kemajuan yang justru acapkali melindas dan menyingkirkan anaknya sendiri.

Waktu dan Dinamika Pelaksanaan

Ambil waktu yang cukup untuk *live-in* dan pastikan bahwa peserta mendapatkan cukup waktu untuk berinteraksi dan hidup bersama di dalam kelompok-kelompok itu. Selanjutnya, biarkan mereka mengalami dinamika sebagaimana yang dialami oleh orang-orang dalam kelompok tersebut. Biarkan saja mengalir, jangan terlalu diatur. Prinsip yang harus dipegang selama *live-in* adalah biarkan mereka “mengalami”, bukan *mentoring*/kursus tertentu dalam kelompok itu. Kalau *live-in* di komunitas petani, biarkan mereka bertani dan bukan diajari tahapan-tahapan bertani dengan pendampingan intensif. Kalau mereka *live-in* di kelompok buruh, biarkan mereka melakukan pekerjaan buruh. Begitu pula di tempat-tempat yang lain.

Langkah-langkah Melakukan *Live-In*

- a. Meleburlah dengan dinamika tuan rumah *live-in*: lakukan apa yang mereka lakukan, ikuti apa yang mereka sedang kerjakan.
- b. Bangunlah dialog dan perjumpaan yang setara dan mendalam. Jadilah teman, bukan pihak yang berada di atas.
- c. Di dalam *live-in*, relasi dan proses dialog serta proses berkembang bersama lebih penting daripada pencarian data. Maka, hindari membawa catatan bila mengganggu dialog. Coba lebih banyak mendengarkan dan bertanya daripada berbicara dan menjelaskan. Tentu, berbicara secukupnya dibutuhkan untuk membangun dialog yang sehat.
- d. Patut diingat: dialog mengandaikan dua pihak berbicara. Jangan menggurui.
- e. Terakhir namun bukan berarti tidak penting: Ini sebuah keterlibatan yang menuntut kematangan. Kita akan bertemu dengan *the other*. Penghargaan terhadap mereka mutlak diperlukan. Jangan sampai memposisikan mereka sebagai objek penelitian semata. Kemampuan dan kelenturan kita untuk berdialog benar-benar akan diuji. Silakan temukan teknik-teknik perjumpaan sejalan dengan improvisasi di lapangan.

Isi Dialog

Panduan berikut berlaku sebagai alat bantu yang dapat dipakai – tentu saja, dapat ditinggalkan jika kurang relevan dan dirasa *counter-productive* untuk membangun jembatan empati– untuk mengarahkan peserta pada proses pasca-*live-in*:

Keluarga/Lingkungan yang Anda Tinggali

- Berapa jumlah anggota keluarga (L/P)? Bagaimana tingkat pendidikannya?
- Bagaimana status hubungan antara anggota keluarga (bapak/ibu/anak/menantu/mertua/teman)?
- Bagaimana kualitas relasi dan komunikasi dalam keluarga tersebut?
- Apa jenis pekerjaannya? Apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk menopang hidup selama sebulan? (Berapa pendapatan per bulan? Berapa pengeluaran sebulan? Bisa menabung?)
- Bagaimana kondisi lingkungan (fisik/geografis) sekitar *tempat tinggal* (bangunan, sanitasi, dsb)? Bagaimana kualitas fisik dan *lingkungan* tempat tinggal pada umumnya?
- Bagaimana tingkat kemakmuran warga pada umumnya? Bagaimana struktur kepemilikan/kesenjangan ekonomi yang ada?

Nilai Pandangan Hidup dan Budaya

- Adakah nilai/kepercayaan/mitos/falsafah hidup tertentu yang dianut oleh mereka? Apa dan seberapa kuat hal itu mempengaruhi hidup?
- Bagaimana mereka memandang hidup?

- Bagaimana pandangan mereka tentang kemiskinan?
- Apakah mereka puas dengan kondisi hidup sekarang?
- Bagaimana pandangan mereka tentang kesuksesan hidup/keluarga/komunitas?
- Apa harapan mereka terhadap pemerintah?

Akses terhadap Media

- Bagaimana kemampuan warga dalam mengakses media?
- Contoh media yang menyentuh masyarakat setempat: adakah surat kabar, majalah, TV, *handphone*, Internet, dan sebagainya di tempat mereka tinggal?
- Apakah sumber informasi utama di masyarakat tersebut? Mulut ke mulut? Radio? Atau jenis media lain?
- Seberapa *update* mereka dengan isu-isu nasional?
- Bagaimana mereka memandang media: Lebih bersifat menghibur? Lebih bersifat mendidik? Atau malah sebaliknya?
- Adakah harapan masyarakat lokal pada media?
- Apakah mereka (pernah) memiliki harapan bahwa suara dan keprihatinan hidup mereka dapat disalurkan kepada pemerintah melalui media?

Catatan: Sekali lagi, bukan banyak/sedikit informasi yang diperhitungkan, melainkan bagaimana *live-in* digali dan dihayati secara penuh: melalui kedekatan personal, empati-simpati, dan kepekaan terhadap realitas yang dihadapi. "*Non-multa, sed multum*" (Bukan banyaknya, melainkan kualitasnya).

B. Memahami Beberapa Isu Sosial Kontemporer

Disusun oleh Leonardus Kristianto Nugraha dan Yanuar Nugroho

B. Memahami Beberapa Isu Sosial Kontemporer

Disusun oleh Leonardus Kristianto Nugraha dan Yanuar Nugroho

Pendahuluan

Mengapa perlu memahami isu sosial kontemporer? Dunia yang kita tinggali ini ibarat sebuah rumah. Masing-masing dari kita adalah penghuninya. Menjadi sesuatu yang wajar bagi penghuni untuk menjaga kebersihan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan rumah. Demikian pula halnya dengan dunia ini. Setiap warga dunia dituntut untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama di dunia. Maka, ketika dunia mengalami fase-fase yang cukup berat, menjadi tugas para warga dunia untuk mengupayakan perubahan kepada sesuatu yang lebih baik.

Dalam zaman ini, ada banyak keprihatinan yang melanda dunia. Mulai dari hal-hal yang secara fisik kelihatan, misalnya es kutub-kutub yang mulai mencair, deforestasi yang menyebabkan polusi udara di mana-mana, bencana alam, hingga pada hal-hal yang secara fisik tidak nampak, seperti praktik korupsi, kemiskinan, aneka macam penyakit, ketimpangan ekonomi, dan seterusnya. Modul ini menawarkan sebuah telaah sederhana mengenai isu-isu sosial kontemporer, sehingga ketika kita melihat aneka keprihatinan, sebagai seorang warga dunia, kita 'terbangun sadar' dan tergerak untuk ambil bagian dalam menyikapi persoalan-persoalan tersebut. Semua itu demi cita-cita akan sebuah tempat tinggal yang sehat, nyaman, teduh, dan aman.

Memahami Konteks: Globalisasi (dan Pengaruhnya)

Melalui optimisme Abad Pencerahan (*Enlightenment*), dengan kemajuan ilmu dan teknologi; diharapkan akan terjadi dunia yang lebih tertib dan stabil. Namun, dunia kontemporer tempat kita hidup sekarang tidak seperti yang diharapkan. Bukannya dapat dikendalikan, namun justru menjadi semakin di luar kendali – atau dalam istilah Giddens, ‘dunia yang tunggang langgang’ (*The Runaway World*). Mengapa demikian? Satu kata kunci untuk menjelaskan terjadinya perubahan dahsyat dalam segala bidang¹ adalah dengan menunjuk pada fenomena globalisasi. Di satu sisi, fenomena globalisasi menunjukkan bahwa dalam banyak hal telah terjadi ‘kebaruan’ yang pesat. Revolusioner, begitu kata banyak orang. Dalam bidang komunikasi misalnya, hari ini sangat dimungkinkan seseorang di sebuah ujung bumi berkomunikasi secara *real time* dengan seseorang di ujung yang lain. Pemindahan uang skala besar juga dapat dilakukan dari antar-rekening antar-benua, hanya dengan satu *click* pada *mouse* komputer. Tak terbantahkan, telah terjadi banyak kemudahan dalam aneka kebaruan dan progresivitas khas era global. Dunia yang luas ini terasa telah dimampatkan sedemikian rupa.

Namun, di lain sisi, persis di dalam aneka kemajuan tersebut, muncul sebuah dilema besar. Ternyata, kemajuan yang diagungkan ini membawa dampak pada pertumbuhan praktik ketidakadilan yang berpangkal dari kesenjangan (ekonomi). Yang paling mencolok adalah semakin kentara jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Data statistik menunjukkan bahwa mereka yang termiskin –seperlima dari warga dunia– pendapatannya terus merosot, dari 2,3% menjadi 1,4% dari seluruh pendapatan dunia, antara 1989-1998.² Sebaliknya, jumlah pendapatan negara-negara terkaya dunia, meningkat cukup signifikan. Hal ini juga tercermin dalam

¹ Imbas globalisasi antara lain merombak nilai-nilai tradisi (bahkan yang berhubungan dengan agama), mentransformasi nilai-nilai dalam keluarga, dan tentu saja implikasi pada ekonomi, politik, dan konteks sosial yang lain.

² Anthony Giddens, “Globalisation”, *BBC Reith Lectures*, 7 April 1999.

pertumbuhan pesat kekuatan kapital perusahaan multinasional (umumnya berbasis di Amerika Serikat) yang semakin melemahkan posisi tawar perusahaan lokal di seluruh penjuru Bumi. Ini semua menunjukkan sebuah paradoks besar: dunia yang bergerak sangat cepat namun hanya mengangkut mereka yang kuat. Sementara itu, yang lemah menjadi semakin sengsara.

Kendati demikian, menjadi keliru jika kemudian lantas berupaya menghindari globalisasi. Globalisasi adalah fakta sejarah, sehingga tidak mungkin dihindari. Yang dapat dilakukan adalah menghindari corak globalisasi yang lebih bersifat merusak dan memperjuangkan corak globalisasi yang 'lebih menguntungkan'. Corak globalisasi dewasa ini cenderung "*memakai kekuasaan uang untuk menentukan tata hukum, kenegaraan, finansial, kultural, sosial, bahkan cuaca akademis-intelektual seturut kepentingan para tuan besar pemilik modal*".³ Corak globalisasi demikian ini menantang para aktivis dan pemikir demokrasi untuk menanggapiinya. Mengapa demokrasi? Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan Giddens yang melihat bahwa cara menjinakkan dunia yang 'tanggung-langgang' adalah dengan memperjuangkan demokrasi.

Globalisasi dengan corak yang melulu mengejar keuntungan ekonomis ini berujung semata pada kesenjangan masyarakat dan rusaknya 'rumah' global. Cepatnya pertumbuhan jurang antara kaya dan miskin, eksploitasi alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim global dan aneka risiko lain yang terkait dengannya, (mungkin) merupakan imbas tidak langsung dari globalisasi corak ini. Boleh jadi, kesemuanya itu merupakan akibat intervensi manusia terhadap lingkungan secara rakus. Ini sama sekali bukan gejala alamiah. Dalam bahasa Anthony Giddens, hal ini dirumuskan dalam frase *manufactured risk*⁴; yang dulu dianggap sebagai alami, kini terjadi tidak lain 'buatan manusia'. Sebagai contoh *manufactured risk* adalah banjir karena deforestasi, bahaya pestisida, sampai radiasi

³ Bdk. B. Herry-Priyono, "FSD Menyangga Dunia", dalam Kompas, 20 Januari 2004.

⁴ Anthony Giddens, "Risk", *BBC Reith Lecture*, 14 April 1999.

layar komputer yang tidak mungkin terjadi ratusan tahun lalu.

Dengan mencermati salah satu corak globalisasi ini, maka yang perlu diupayakan adalah membuka kemungkinan terjadinya *“globalisasi yang mempunyai dampak jauh lebih adil bagi kesejahteraan mayoritas warga dunia dan bukan hanya segelintir tuan besar finansial.”*⁵

Pertanyaannya kemudian adalah: apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan globalisasi yang bercorak ‘demi kemaslahatan orang banyak’? Jawaban yang bisa dikemukakan adalah keberanian untuk bersuara dan menentukan/memperjuangkan nasib sendiri, karena kita berada di dalam ‘alam’ yang sama. Keprihatinan dunia adalah keprihatinan kita sebagai warga dunia.

Secara lebih konkret, mengambil peran dan bersuara berarti pula ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Aneka keputusan yang diambil, tanpa kita terlibat di dalamnya secara otentik, hanya akan menguntungkan segelintir pihak yang memang secara oportunistik mempergunakan akses kepada kekuasaan. Jika demikian yang terjadi, maka eksploitasi tetap terjadi. Artinya, kemiskinan dan jurang pemisah akan tetap ada dan berskala besar. Rumah Bumi akan semakin rusak karena segelintir orang dengan rakusnya terus mengeksploitasi Bumi demi keuntungan mereka sendiri.

Lantas, apakah benar upaya kita untuk terlibat dan ambil peran lewat sebuah tindakan kecil di sebuah sudut Bumi juga akan mempengaruhi kelompok lain di sudut lain Bumi dan/atau bahkan mempengaruhi seluruh warga dunia? Gagasan Giddens mengenai *‘time-space distancing’*⁶, selain menjelaskan gejala terjadinya globalisasi, ternyata juga menunjukkan bahwa yang mikro mempengaruhi yang makro. Perubahan skala kecil di sebuah ujung Bumi, juga akan mempengaruhi adanya perubahan di sudut Bumi yang lain. Jika memang gejala globalisasi mengkonfirmasi hal ini, su-

³ Bdk. B. Herry-Priyono, “FSD Menyangga Dunia”, dalam Kompas, 20 Januari 2004.

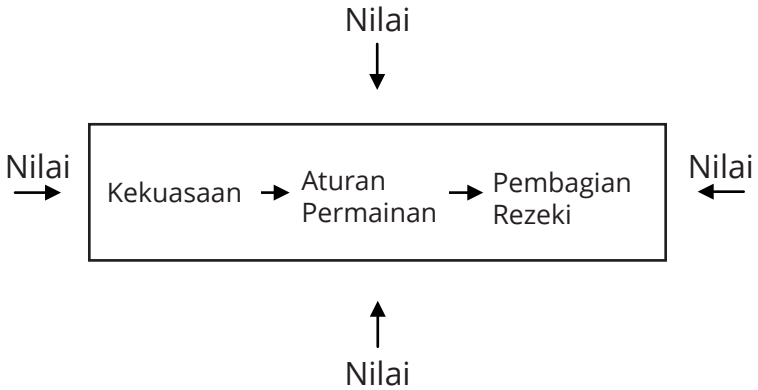
⁶ Bdk. B. Herry-Priyono, Anthony Giddens: Suatu Pengantar (Jakarta: KPG, 2002), Hal. 36-45.

dah barang tentu kita bisa berharap bahwa upaya kecil perbaikan kita di sebuah sudut Bumi juga akan berdampak menghasilkan rumah Bumi yang lebih toleran dan adil kepada warganya, entah dalam bidang ekonomi, politik, budaya, lingkungan, maupun bidang lainnya.

Pembagian Rezeki dan Kekuasaan⁷

Rezeki atau kekayaan yang ada dalam masyarakat jumlahnya terbatas, sedangkan jumlah anggota masyarakat yang ingin mendapatkan rezeki itu banyak. Karena itu, rezeki yang langka itu menjadi barang yang diperebutkan. Supaya tidak terjadi perebutan rezeki yang anarkis, perlu dibuat aturan permainan. Supaya aturan permainan ditaati, yang membuat aturan permainan itu adalah pemegang kekuasaan.

⁷ Istilah kekuasaan sering salah kaprah ditangkap, menciut maknanya menjadi “pemerintah”; sama halnya “demokrasi” menyempit menjadi “pemilihan umum”. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah daya yang dimiliki seseorang/kelompok sedemikian rupa sehingga keinginan/kehendaknya dipenuhi oleh pihak lain. Sumber kekuasaan dapat berupa uang, jabatan, pendidikan, moral (misal pada para pemimpin agama), senioritas, daerah asal, massa..



Gambar 1 Skema Pengaruh Nilai terhadap Kekuasaan, Aturan Permainan, dan Pembagian Rezeki⁸

Skema di atas menunjukkan, supaya seseorang atau suatu kelompok mendapatkan pembagian rezeki yang memadai, orang atau kelompok itu harus ikut membuat aturan permainan. Mengapa? Karena pembagian rezeki ditentukan oleh aturan permainan, sehingga perlulah mereka memiliki kekuasaan untuk membuat aturan permainan. Karena kekuasaan secara tidak langsung menentukan pembagian rezeki dan rezeki menjadi barang yang diperebutkan, kekuasaan pun menjadi barang yang diperebutkan. Karena itu, ada konflik, pertentangan, untuk memperebutkan kekuasaan dalam rangka memperebutkan pembagian rezeki.

Menegakkan keadilan dan melayani kelompok terpinggirkan berarti membantu mereka untuk memiliki kekuasaan agar mereka dapat ikut membuat aturan permainan untuk menentukan pembagian rezeki. Aturan permainan yang tidak adil terjadi ketika aturan itu dibuat oleh seseorang atau suatu kelompok atau kelas, tanpa meli-

⁸ Skema ini terutama dipengaruhi oleh pendekatan analisis sosial yang ditawarkan oleh Suryawasita.

batkan orang atau kelompok atau kelas lain yang ikut berkepentingan, karena orang atau kelompok atau kelas yang membuat aturan permainan itu memonopoli kekuasaan, sedangkan orang atau kelompok atau kelas lain yang tidak diikutsertakan dalam pembuatan aturan permainan itu tidak memiliki kekuasaan. Jadi kekuasaan itu penting, pentinglah kelas yang terpinggirkan dibantu untuk memiliki kekuasaan.

Aturan permainan yang adil terjadi ketika semua orang, kelompok, atau kelas yang berkepentingan diikutsertakan untuk membuat aturan permainan secara bersama-sama. Inilah artinya demokrasi. Semua pihak dapat terlibat untuk membuat aturan permainan bila semua pihak memiliki kekuasaan yang seimbang dan merata. Contoh-contoh dalam masyarakat: buruh sering dikalahkan oleh pengusaha, karena buruh tidak memiliki kekuasaan yang seimbang dengan yang dimiliki oleh pengusaha. Perempuan sering dikalahkan oleh laki-laki, karena perempuan tidak memiliki kekuasaan—*fisik* merupakan salah satu *sumber kekuasaan*—yang seimbang dengan yang dimiliki oleh pengusaha terhadap buruhnya.

Secara gamblang dapat dikatakan demikian:

- *Pertama*, di dalam masyarakat ada kelas yang dibentuk berdasarkan rezeki yang diperoleh, yaitu (1) kelas atas (jumlah sedikit tapi mendapat rezeki terbanyak), (2) kelas menengah (jumlah lumayan dan mendapatkan rezeki lumayan), serta (3) kelas bawah (jumlah terbanyak namun mendapatkan rezeki yang paling sedikit). Demikian, terjadi pembagian rezeki/pendapatan yang tidak merata di dalam masyarakat.
- *Kedua*, di antara kelas-kelas itu terdapat konflik (kepentingan) kelas yang tidak selalu transparan atau tersembunyi.
- *Ketiga*, perbedaan perolehan rezeki disebabkan oleh “aturan/kebijakan” yang dibuat sedemikian rupa oleh sekelompok kecil orang yang diuntungkan dengan aturan itu sehingga merugikan kelas-kelas lain yang berjumlah jauh lebih besar, terutama merugikan kelas bawah. Demikianlah terjadi penindasan dan ketidakadilan.

- *Keempat*, segelintir orang dapat membuat aturan permainan tersebut karena memiliki akses dan memonopoli kekuasaan.
- *Kelima*, aturan/kebijakan yang tidak adil berlangsung lama karena kelas lain dibuat tidak sadar dan dibuat tidak memiliki akses kepada kekuasaan.
- *Keenam*, situasi yang tidak adil ini turut diperparah dengan nilai-nilai persaingan tidak sehat, ketidakpedulian sosial, ketidak-samarataan.
- *Ketujuh*, kelas bawah/terpinggirkan adalah kelas dalam masyarakat yang miskin baik secara ekonomi (pendapatan rendah), politis (tidak memiliki akses kekuasaan), dan bahkan sosial (tidak dihormati, dihargai, direndahkan, dapat dikorbkan begitu saja dan kadang dianggap tidak berarti).
- *Kedelapan*, untuk memperjuangkan pembagian rezeki dan kekuasaan yang merata, diperlukan penyadaran akan proses pembuatan kebijakan yang adil, yakni secara partisipatoris; selain memperjuangkan nilai-nilai persaudaraan, kerjasama, kesetiakawanan sosial dan kesamarataan. Demikian, memperjuangkan keadilan sosial berarti juga memperjuangkan pemerataan kekuasaan. Inilah demokrasi. Namun, hal ini tidak mudah karena kelompok kecil tersebut memiliki akses luas (sekaligus monopolistik) akan informasi sehingga memantikan akses masyarakat luas terhadap proses pembuatan kebijakan secara partisipatif.

Isu-isu Kontemporer dalam Masyarakat Kita

Berikut ini disajikan beberapa isu-isu kemasyarakatan yang dipotret dari kacamata STEEPV (*Social, Technology, Economy, Environment, Politics and Value*) yang membantu memposisikan diri dalam konteks persoalan dunia secara umum, dan Indonesia secara khusus.

Pemahaman akan isu-isu ini mengindikasikan bahwa ada banyak persoalan mendesak yang perlu diselesaikan:

1. Persoalan Sosial

Beberapa tema persoalan sosial yang dapat disebut dalam kategori ini adalah mengenai perubahan corak demografi (pengangguran, mobilitas sosial), pendidikan gender, persoalan anak muda, individualisme, inklusi sosial, dan sebagainya.

Menyangkut perubahan corak demografi, misalnya, baru-baru ini Departemen Tenaga Kerja A.S mengeluarkan data mengenai pertumbuhan jumlah pengangguran di negara itu. Pada awal September tahun ini, tercatat ada 428.000 orang yang mengajukan bantuan dana penganggur. Di Indonesia sendiri, jumlah pengangguran terbuka juga meningkat menjadi 9,25 juta orang pada 2011 ini (data Kemenakertrans). Jumlah pengangguran penuh berkisar pada angka 12,8 juta (BPS, 2010). Sementara jumlah setengah pengangguran (kerja kurang dari 35 jam/minggu) terus meningkat dari tahun ke tahun: 29,64 juta pada 2005; naik menjadi 32,8 juta pada 2010; dan diperkirakan 34,32 juta pada 2011 (data LIPI).

Fenomena pengangguran di Indonesia boleh jadi terkait erat dengan tema persoalan sosial yang lain, yakni migrasi dan/atau urbanisasi. Dalam hal ini, bisa dicatat bahwa Jawa (terutama DKI Jakarta dan kota-kota satelitnya) menjadi daerah rujukan migrasi di Indonesia. Yang mencengangkan, lonjakan arus urbanisasi ke Jakarta rata-rata berkisar pada angka 200.000-250.000 per tahunnya (setidaknya sampai Oktober 2007). Lonjakan ini berimplikasi besar, salah satunya anggaran yang disediakan untuk penduduk Jakarta meningkat secara signifikan setiap tahunnya.

2. Persoalan Teknologi

Persoalan lain akibat timpangnya tingkat kesejahteraan penduduk dunia dan konsentrasi ekonomi pada titik-titik tert-

entu juga menyebabkan kesenjangan teknologi pada warga dunia. Ada kelompok-kelompok tertentu yang begitu berge- limang dengan kemudahan teknologi, sementara ada kel- ompok tertentu yang begitu tertinggal dalam hal teknologi. Kepentingan politis tertentu terkadang juga menjadi hambatan dalam pemerataan teknologi. Oleh karena itulah, setiap daerah memiliki isu yang berbeda terkait dengan teknologi. Area yang memiliki masalah dengan keamanan dan kecepa- tan transfer *file* hampir bisa dipastikan bukan area yang ter- tinggal secara teknologi. Sebaliknya, daerah yang kesulitan dalam mengakses internet, bisa dibilang merupakan daerah yang infrastrukturnya tertinggal.

Dalam kasus Indonesia: kendati pertumbuhan jumlah peng- guna internet terbilang tinggi, mencapai 31 juta pengguna pada 2010, namun akses infrastruktur masih terbatas pada Jawa-Bali dan Sumatera. Daerah lain di luar ketiganya masih tertinggal dalam infrastruktur. *Cable broadband* hanya terse- dia di kota-kota besar Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan, lebih dari 50% kapasitas *cable broadband* tersebut terpasang di Jakarta dan kota-kota satelitnya (Mang- galanny, 2010).

3. Persoalan Ekonomi

Persoalan ekonomi sepertinya menjadi persoalan yang be- gitu populer dewasa ini. Persoalan sistem pasar, distribusi pertumbuhan ekonomi, kompetisi ekonomi, hingga imbas langsung kepada meningkatnya angka kemiskinan di penjuru dunia. Dahsyatnya gelombang kemiskinan ini bisa dilihat dari jumlah anak yang meninggal setiap harinya. Hari ini, tercatat 21.000 anak meninggal setiap harinya di seluruh dunia. Ang- ka tersebut sama artinya dengan 14 anak mati setiap menit dan seorang anak mati setiap 4 detik. Rata-rata, penyebab utama kematian mereka adalah kelaparan dan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, dan sebab-sebab lain yang terkait dengan kemiskinan.

Persoalan ekonomi telah sedemikian akut dan mendera se-

luruh bumi. Hampir setengah penduduk bumi –lebih dari 3 milyar orang– hidup dari uang \$2.50 setiap harinya (World Bank, 2008). Dari angka tersebut, 1 milyar anak hidup dalam kemiskinan, 640 juta hidup tanpa tempat perlindungan yang layak, 400 juta tidak memiliki akses air bersih, 270 juta tidak memiliki akses pelayanan kesehatan. Pada 2003, 10,6 juta anak mati sebelum mencapai usia 5 tahun (data UNICEF, 2005).

4. Persoalan Lingkungan

Persoalan lingkungan menjadi salah satu tema yang cukup menarik perhatian banyak orang. Kepekaan terhadap lingkungan tampaknya tumbuh seiring dampak *global warming* yang dirasakan oleh warga dunia. Aneka seruan untuk lebih memperhatikan lingkungan dan hewan terus tumbuh. Gerakan ‘hijau’ (*green movement*) menjadi lazim dijumpai, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini tidak aneh mengingat terdapat keprihatinan besar menyangkut lingkungan hidup.

Dalam laporan Departemen Kehutanan, laju deforestasi periode 2003-2006 mencapai 1,17 juta hektar/tahun. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan laporan State of the World’s Forests 2007 yang dikeluarkan oleh The UN Food & Agriculture Organization (FAO) yang menyebut bahwa angka deforestasi pada periode 2000-2005 mencapai 1,8 juta hektar/tahun. Demikian, dari total luas hutan Indonesia (sekitar 180 juta hektar), 21% (26 juta) telah musnah. Laporan FAO itu sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat ke 2 dari 10 negara dengan laju kerusakan tertinggi di dunia. Salah satu sebab deforestasi di Indonesia adalah adanya lahan perkebunan sawit tahun-tahun belakangan ini.

5. Persoalan Politik

Dalam arus perubahan sebagai dampak globalisasi, di dalam politik mulai berkembang gerakan-gerakan demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika terjadi aneka praktik *lobbying* dalam politik yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara dan ter-

jadi perkawinan antara politik dan pasar; di dalam masyarakat tumbuh kesadaran untuk mewujudkan ideal demokrasi: kembali ke rakyat. Oleh karena itu, isu yang muncul juga menyangkut mengenai partisipasi warga di dalam politik. Di dalam pandangan Giddens, inilah letak imperatif *civil society*; karena politik dalam kondisi modernitas tidak bisa lagi hanya berada di tangan pemerintah dan parlemen.⁹ Beberapa elemen persoalan politik yang lain adalah sebagai berikut: mengenai sudut pandang politis yang dominan, ketakstabilan politis, peranan regulator dan pemerintah, mengenai parpol, dan sebagainya.

6. Persoalan Nilai

Globalisasi melalui perkembangan pesat teknologi (terutama teknologi informasi komunikasi) telah memampatkan bumi ini menjadi seolah seluas desa kecil. Dalam suasana itu, terjadi pertukaran aneka nilai, adat, kebiasaan lintas negara dan bangsa. Budaya suatu daerah dapat dikenal di penjuru Bumi lain dan sebaliknya. Namun, kerap kali orang menjadi lupa bahwa aktor dominan dalam globalisasi juga turut menyebarkan norma dan gagasan mereka ke seluruh penjuru dunia. Beberapa pengamat yang kritis melihat bahwa Barat (lebih spesifik adalah Amerika Serikat) cenderung untuk memaksakan ekspansi gagasan dan norma-norma mereka ke dalam norma lokal. Salah satu yang terlihat misalnya dalam hal preferensi hiburan. Karena itulah, bisa dijelaskan pula mengapa kebanyakan generasi muda Jawa cenderung mengambil opsi menonton film di bioskop (dan produksi Hollywood) dibanding menonton wayang semalam suntuk.

Giddens pernah mengingatkan agar mewaspadaikan revolusi global yang tengah berlangsung, sebuah revolusi yang bahkan turut mempengaruhi kehidupan manusia yang paling pribadi: seksualitas, hubungan pribadi, perkawinan, dan

⁹ B. Herry-Priyono, Anthony Giddens: Suatu Pengantar (Jakarta: KPG, 2002), hal. 72.

keluarga. Hal ini terkait erat dengan perubahan paradigma menyangkut kesetaraan gender, mulai terbukanya pandangan akan kaum LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*), maupun perubahan makna mengenai perkawinan yang kerap kali dipandang sebagai salah satu sebab tumbuh pesatnya angka perceraian.

Penutup

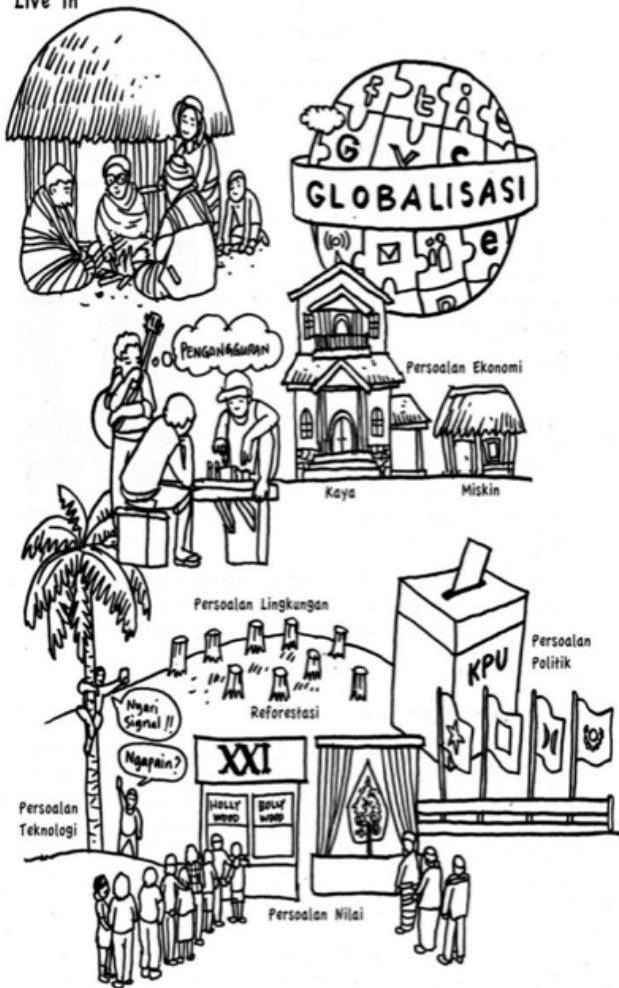
Menyoroti dan memahami isu-isu kontemporer merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Namun, ketika seseorang menjadi tahu dan kemudian berhenti, itu sama sekali tidak cukup. Nelson Mandela pernah berujar, *"A good head and a good heart are always a formidable combination"*. Maka, ketika kognisi terbuka (dan seyogyanya hati pun tergerak untuk ambil peran, dalam skala besar maupun kecil) akan upaya penyelesaian persoalan isu-isu ini; saat itulah sebenarnya harapan akan hidup yang lebih baik muncul. Hidup yang lebih baik bukan hanya untuk saya, tapi untuk Anda, untuk kita, dan untuk generasi-generasi setelah kita. Menjadi tahu akan isu kontemporer mengundang setiap warga dunia untuk bangun, berjalan, mengambil tongkat, dan 'berperang' mewujudkan sebuah cita-cita mulia akan tempat tinggal yang sehat, nyaman, teduh, aman, dan tentu saja 'manusiawi'.

Bacaan Lanjut

- Giddens, Anthony. 1999. *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita* (terj. Andry Kristiawan dan Yustina Koen). Jakarta: Gramedia.
- Herry-Priyono, B. 2002. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: KPG.
- Manggalanny, M.S. (2010) Indonesia Infrastructure - Internet Statistic 2010 and Projection: The Latest Trend. Presentation at Satudunia Workshop on Internet and Civil Society, July 2010.

ANALISA SOSIAL

Live in



C. Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia

Disusun oleh Leonardus Kristianto Nugraha dan Yanuar Nugroho

C. Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia

Disusun oleh Dinita Andriani Putri dan Yanuar Nugroho

"In our seeking for economic and political progress, we all go up –or else we all go down."

- Franklin D. Roosevelt

Pendahuluan

Pada umumnya, kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan politik yang dianut negara tersebut. Sistem ekonomi dan sistem politik adalah dua hal yang berkaitan sangat erat dan saling memengaruhi. Sistem politik pada dasarnya mencakup mekanisme pemerintahan, maka sistem politik terdiri dari struktur-struktur baik formal maupun informal yang terintegrasi dan terorganisasi. Sistem ekonomi adalah mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana **cara sistem itu mengatur faktor produksinya**. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem tersebut (Wikipedia, 2011c).

Berdasarkan perbedaan pengaturan faktor produksinya, ada dua kutub didalam spektrum sistem ekonomi, yaitu **sistem ekonomi kapitalis** di satu kutub dan **sistem ekonomi sosialis** di kutub lain.

Sistem-sistem ekonomi lainnya berada dalam bentangan diantara kedua kutub ini. Mirip dengan ini adalah sistem politik yang juga membentang di antara dua kutub, yakni **sistem politik totalitarian** dan **sistem politik demokrasi**. Sistem-sistem lainnya ada dalam bentangan di antara kedua kutub ini. Berikut ini akan dibahas mengenai sistem-sistem dasar ekonomi dan politik tersebut dan perbedaannya satu sama lain.

Tujuan dari modul ini adalah memberikan pengertian dasar dari sistem ekonomi dan sistem politik, mengelaborasi jenis-jenis sistem ekonomi dan sistem politik dan perkembangannya serta bagaimana keterkaitan antara sistem ekonomi dan politik tersebut membentuk suatu sistem tertentu yang dijalankan oleh suatu negara.

Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi Kapitalis

Bapak pemikiran kapitalisme adalah Adam Smith. Smith berpendapat bahwa kompetisi akan mendorong tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya yang ada (1976: Book I). Lebih lanjut, kompetisi bebas yang diidamkan oleh Smith mensyaratkan tidak adanya campur tangan pemerintah. Dalam kompetisi tersebut, pembeli bebas mencari barang dan jasa sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Penjual akan bersaing untuk menawarkan harga produk yang lebih murah dibanding pesaingnya. Hal ini dicapai melalui efisiensi biaya produksi. Maka, pada akhirnya, pembeli memperoleh produk dengan harga termurah, sementara penjual memproduksi barang dan jasa pada tingkat yang paling efisien. Kompetisi bebas tersebut juga mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak (kepentingan publik):

"It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages."
(1776: Book I, p. 13)

Oleh karena itu, Smith berpendapat bahwa negara tidak perlu ikut campur tangan karena kompetisi bebas telah mengatur dengan baik pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Namun, Smith tidak menganggap bahwa negara tidak memiliki peran sama sekali. Smith (1976: Book V) memandang bahwa peran negara masih diperlukan dalam sektor hukum, keamanan dan pertahanan, serta pendidikan.

Berdasarkan pemikiran Smith, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi berdasarkan kepemilikan pribadi atau korporasi, di mana alat-alat produksi dikuasai oleh pribadi dan atau para pemilik modal. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah tidak punya kendali dalam perekonomian negara, dan perekonomian berjalan menurut hukum penawaran dan permintaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karakteristik dari sistem ekonomi ini adalah kompetisi bebas antar pemilik faktor produksi.

Sistem Ekonomi Sosialis

Bisa dikatakan bahwa pemikiran sosialisme adalah anti tesis dari pemikiran kapitalisme. Bapak pemikiran sosialisme adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi yang menyatakan bahwa perencanaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil-hasil produksi dikuasai dan diatur oleh negara (MCWDN, 2011). Dalam sistem ekonomi sosialis, alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karakteristik sistem ekonomi sosialis adalah kebersamaan ekonomi atau kolektivisme yang terlihat dari tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi. Secara umum, perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Indikator	Sistem Ekonomi Kapitalis	Sistem Ekonomi Sosialis
1	Alat produksi	Milik pribadi/pemilik modal.	Milik masyarakat, digunakan untuk kepentingan masyarakat.
2	Perindustrian	Pemusatan industri dengan spontan, cenderung monopoli.	Industri berperan penting, dan hasil produksi harus ditingkatkan setiap tahun.
3	Kekuatan politik	Terkonsentrasi pada kaum elit pemilik modal.	Terkonsentrasi pada elit pemerintah.
4	Kepemilikan Modal	Terkonsentrasi pada kaum elit pemilik modal.	Terkonsentrasi pada sekelompok kaum yang dikontrol oleh elit birokrat.
5	Properti	Melindungi hak properti individu. Memonopoli akses kesempatan kepemilikan.	Meniadakan hak properti individu. Kontrol produksi ada di tangan elit politik.
6	Harga dan upah	Dilindungi dari persaingan global.	Dikontrol oleh pemerintah atau elit politik.
7	Karakteristik	Persaingan antar-pemilik modal/pelaku usaha.	Kerjasama antar-pelaku usaha.
8	Kesejahteraan	Ditentukan oleh banyaknya modal yang dimiliki oleh suatu negara.	Ditentukan oleh kesamaan ekonomi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam produksi.

Tabel 1 Perbedaan antara Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis
Sumber: Penulis

Sistem Politik

Sistem Politik Totalitarian

Sistem politik totalitarian adalah bentuk sistem politik dimana suatu negara tidak hanya berusaha menguasai segala aspek ekonomi dan politik masyarakatnya, tetapi juga berusaha menentukan nilai-nilai 'baik' dan 'buruk' dari perilaku, kepercayaan dan paham dari masyarakat. Akibatnya adalah tidak ada lagi batas pemisah antara hak dan kewajiban oleh negara dan oleh masyarakat (Wikipedia, 2011e). Dengan kata lain, dalam sistem politik totalitarian tidak ada pengakuan atas kebebasan individu.

Istilah ini pertama kali digunakan oleh diktator Italia Benito Mussolini dan kemudian digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan rezim Nazi Jerman dan Soviet pada masa Perang Dingin. Sistem politik totalitarian seringkali disamakan dengan otoritarian, padahal terdapat perbedaan antara keduanya dilihat dari sejauh mana kekuasaan negara. Dalam totalitarian, negara menguasai segala aspek sampai kepada cara berfikir dan moral masyarakat, sedangkan dalam otoritarian, kekuasaan negara tidak memasuki ranah institusi sosial dan ekonomi, sehingga masih menyisakan ruang untuk kehidupan pribadi masyarakat.

Sistem Politik Demokrasi

Sistem politik demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan (Wikipedia, 2011a). Karakteristik utama dari sistem politik demokrasi ini adalah diakuinya kebebasan dan hak-hak individu, serta adanya partisipasi individu dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi yang umum digunakan sekarang ini adalah demokrasi perwakilan yang ditandai dengan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan. Melalui perwakilan-perwakilan ini, masyarakat turut serta menentukan jalannya pemerintahan.

Secara umum, perbedaan antara sistem politik totalitarian dan sis-

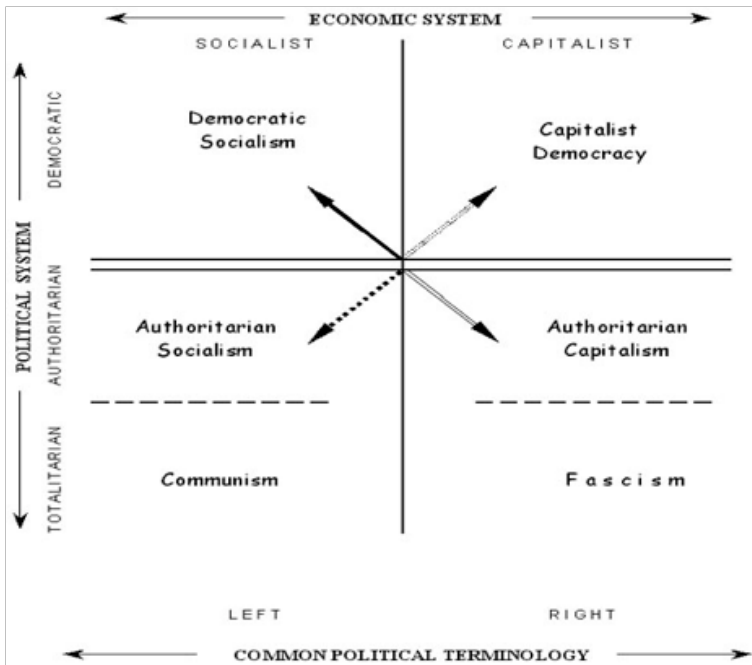
tem politik demokrasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Indikator	Totalitarian	Demokrasi
1	Kontrol Negara	Sangat tinggi dan menguasai semua aspek, sampai dengan moral dan pemikiran masyarakat	Ada pada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui sistem perwakilan.
2	Kebebasan Individu	Tidak diakui.	Diakui, dilindungi oleh negara dan diatur oleh Undang-Undang.
3	Keberadaan Partai Politik	Hanya ada satu partai tunggal milik pemerintah	Ada sistem multi partai.

Tabel 2 Perbedaan antara Sistem Politik Totalitarian dan Sistem Politik Demokrasi
 Sumber: Penulis

Perpaduan Sistem Politik Ekonomi

Ketika dua spektrum ini –sistem ekonomi dan politik—diletakkan secara berisiran, terbentuklah beragam arena sistem ekonomi-politik yang unik (lihat gambar di bawah). Inilah yang disebut ideologi, yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan sistem ekonomi dan politiknya.



Gambar 2 Kuadran Politik Ekonomi
Sumber: Bambang Warih Kusuma, "Mengapa Sosial Demokrasi?"

Dari beragam ideologi di atas, ada beberapa ideologi yang akan dibahas, yaitu sosial demokrat, komunisme, fasisme dan kapitalis demokrat.

Sosial demokrat merupakan bentuk pelaksanaan Sistem Ekonomi Sosialis di dalam Sistem Politik Demokrasi. Menurut Anthony Giddens dalam bukunya *"The Third Way: The Renewal of Social Democracy"*, sosial demokrat mengambil nilai-nilai kesejahteraan dan humanisme sosialisme demokrasi klasik, namun ditambahkan juga masalah ekologi dan globalisasi yang harus diperhatikan dewasa ini. Bentuk lain dari kombinasi antara Sistem Ekonomi dan Sistem Politik adalah **Sistem Komunisme** yang muncul akibat kombinasi antara

Sistem Ekonomi Sosialis dan Sistem Politik Totalitarian. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19. Komunisme beranggapan bahwa perubahan sosial dimulai dari buruh (kaum proletar), namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai (Anarchopedia, 2011). Komunisme juga sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu, karena pada prinsipnya semua direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat.

Walaupun sudah tidak ada lagi negara yang menjalankan Sistem Komunisme murni, namun negara-negara yang masih diasosiasikan dengan sistem tersebut antara lain Republik Rakyat Cina (RRC), Kuba, dan Korea Utara. RRC merupakan salah satu negara yang unik dimana sistem politik yang diacu adalah komunisme, sementara sistem ekonomi yang dipakai adalah kapitalisme terbatas (Wikipedia, 2011d).

Sementara itu, ideologi **Fasisme** yang dianut oleh Nazi merupakan gabungan dari Sistem Politik Totalitarian dengan Sistem Ekonomi Kapitalis. Fasisme berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis dan nilai. Mereka menganjurkan pembentukan partai tunggal negara totaliter yang berusaha memobilisasi massa suatu bangsa demi terciptanya “manusia baru” yang ideal untuk membentuk suatu elit pemerintahan (Wikipedia, 2011b). Fasisme melekat pada korporatisme dimana representasi politik lebih berdasarkan pada industri dan perdagangan daripada pada letak geografis. Korporatisasi dalam fasisme dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya perekonomian, seperti aksi protes pekerja dan buruh (Richman, 2011).

Penggabungan sistem ekonomi kapitalis dalam sistem politik demokrat akan menghasilkan ideologi **Kapitalis Demokrat**, yaitu adanya ketergantungan pemerintah terhadap kaum kapitalis dalam menggerakkan perekonomian rakyatnya. Kapitalis menyangkut tentang penguasaan atas barang, sementara demokrasi menyangkut penguasaan atas orang. Munculnya kapitalisme perusahaan membawa arus baru bagi demokrasi, dan karena bertahannya suatu rezim demokratis ditentukan oleh sejauh mana rezim itu mening-

katkan kesejahteraan ekonomi penduduk, maka para pejabat negara makin tidak bisa tidak dekat dengan para kapitalis (Priyono, 2000). Para kapitalis ini mempunyai kekuasaan yang besar dalam menentukan kesejahteraan masyarakat karena mereka menanamkan modal dan menggiatkan investasi yang menggerakkan keadaan ekonomi masyarakat.

Sistem Ekonomi-Politik Indonesia

Indonesia sendiri pernah mengalami sistem ekonomi yang cenderung bersifat sosialis pada masa awal tahun 1960-an sampai dengan masa Orde Baru, ketika Presiden Sukarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, meningkatkan peran pekerja dalam perusahaan-perusahaan publik dan menggalakkan distribusi lahan.

Memasuki era Orde Baru, Presiden Soeharto meninggalkan ideologi sosialisme dan merubah hampir seluruh kebijakan sebelumnya. Soeharto cenderung menggunakan cara militer dalam membenahi perekonomian Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas (BBC, 2008). Program ekonominya yang dikenal dengan nama PELITA atau Pembangunan Lima Tahun membuka kesempatan seluas-luasnya kepada investor asing untuk masuk sehingga perekonomian pada umumnya mengacu pada pemikiran kapitalisme.

Perkembangan ekonomi yang semakin liberal ini tidak serta merta diikuti dengan perubahan pada sistem politik yang masih cenderung mengarah pada otoritarianisme di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bersifat sentralistis dan teramat birokratis, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi-politik pada masa itu adalah kapitalisme otoritarian. Pembangunan yang tidak merata dan cenderung terpusat membuat perbedaan ekonomi antar-daerah semakin tajam. Ketimpangan perkembangan ekonomi dan politik ini kemudian memunculkan kesenjangan sosial dan kemiskinan, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

Pasca-Orde Baru atau biasa disebut dengan Era Reformasi, Sistem

Politik Demokrasi mulai digalakkan kembali dengan munculnya beragam partai dan partisipasi aktif masyarakat di dalam pemerintahan dan badan-badan usaha publik yang sebelumnya hanya dikuasai oleh militer, birokrat dan elit politik saja. Sistem perekonomian kembali bergerak ke arah liberal kapitalisme di mana pintu untuk investor asing terbuka dengan luas. Secara singkat, perkembangan sistem ekonomi dan politik Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Sistem											
Ekonomi	Sosialisme	Etatisme	Kapitalisme								
Politik	Otoritarian							Demokrasi			
Tahun	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015

Tabel 3 Politik Ekonomi Indonesia Antar Masa
Sumber: Penulis

Bila dilihat dari tabel di atas, dewasa ini sistem ekonomi-politik Indonesia berada di ranah kapitalisme demokrasi dimana para pemilik modal dan investor berperan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Berubahnya kapitalisme-otoritarian menjadi kapitalisme demokrasi adalah karena adanya konflik kaum kapitalis dan pejabat pemerintah pada masa Orde Baru dimana dua kaum tersebut terdiri dari orang-orang yang sama. Dewasa ini, kaum kapitalis dapat dikatakan mempunyai “kekuasaan struktural” di sektor bisnis atas negara dan masyarakatnya.

Kesimpulan dan Penutup

Sistem ekonomi dan sistem politik merupakan dua hal yang saling berkaitan. Gabungan dari satu sistem ekonomi dan satu sistem politik kemudian menjadi suatu ideologi yang menjadi dasar negara dalam menjalankan pemerintahannya. Ada empat ideologi besar yaitu sosial demokrat, komunisme, fasisme, dan kapitalis demokrat.

Perbedaan dari tiap ideologi tersebut terletak pada pengaturan kekuasaan negara atas barang dan masyarakat.

Sepanjang sejarahnya, Indonesia pernah mengalami beberapa perubahan ideologi, dari sosialisme otoritarian, kapitalisme otoritarian, sampai sekarang berada di kapitalis demokrat. Perubahan ideologi ini selain karena pemerintahan yang berganti, juga karena kapitalis mempunyai apa yang disebut "kekuasaan struktural", dimana jatuh-bangunnya ekonomi dan kesejahteraan penduduk Indonesia semakin ditentukan oleh para kapitalis.

Referensi

- Anarchopedia (2011) 'Komunisme', didapat dari <http://ind.anarchopedia.org/Komunisme> [online] diakses pada 03/09/2011
- BBC Indonesia (2008) 'Ekonomi Di Bawah Orde Baru', didapat dari http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2008/01/080127_suhartoeconomy.shtml [online], diakses pada 14/09/2011
- Giddens, Anthony. 1999. Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial (terj. oleh Ketut Arya Mahardika). Jakarta: Gramedia.
- Koesoema, Bambang Warih (2002) 'Mengapa Sosial Demokrasi?', didapat dari http://www.unisosdem.org/kumtul_detail.php?aid=55&coid=4&caid=9&auid=1 [online] diakses pada 26/09/2011
- MCWDN (2011) 'Socialism and Capitalism', didapat dari <http://www.mcwdn.org/ECONOMICS/CapSoc.html> [online], diakses pada 03/09/2011
- Priyono, Herry B (2000) 'Demokrasi dan Kapitalisme', didapat dari http://www.unisosdem.org/kumtul_detail.php?aid=84&coid=1&caid=34&auid=3 [online] diakses pada 27/09/2011
- Richman, Sheldon (2011) 'Fascism', didapat dari <http://www.econlib.org/library/Enc/Fascism.html> [online] diakses pada 15/09/2011
- SMITH, A. (1776) *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

